

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “**Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Layanan Streaming Netflix**” dengan 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu, : (1) Urgensi pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap layanan streaming netflix (2) Upaya pemerintah Indonesia untuk memungut pajak pertambahan nilai pada aplikasi Netflix.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan metode penelitian hukum normatif. Disamping itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa urgensi pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap aplikasi streaming Netflix yakni dapat dikaitkan dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dengan cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE. Sehingga Netflix sebagai subjek PMSE dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) senilai 10% yang dibebankan terhadap konsumen atau pembeli dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no. 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Kata Kunci : Pajak, Pemungutan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Netflix

ABSTRACT

This thesis is entitled " Value Added Tax for Netflix Streaming Services" with 2 (two) main issues, namely: (1) Urgency of Value Added Tax for Netflix Streaming Services (2) Indonesian government efforts to collect value added tax on Netflix Streaming Services.

This research is a type of legal research with normative legal research methods. Besides this research uses a statutory approach and a conceptual approach.

The results of this thesis study show that the Legis Ratio of value added tax collection to the Netflix streaming application can be attributed to Perpu Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability by the imposition of Value Added Tax on the utilization of Intangible Taxable Goods and or Taxable Services from outside the Customs Area within the Customs Area through the PMSE. So that Netflix as a subject of PMSE is subject to a value-added tax (VAT) rate of 10%, which is charged to consumers or buyers at the tax rate as stipulated in Law no. 42 of 2009 concerning the Third Amendment to Law Number 8 of 1983 concerning Value Added Tax of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods.

Keywords : Tax, Tax Collection, Value Added Tax, Netflix